

DPRD Bekasi Minta Pemkot Tingkatkan Patroli Malam di Kawasan Rawan Kejahatan

KOTA BEKASI, Prolite – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk memperkuat upaya menjaga keamanan masyarakat melalui peningkatan patroli malam dan pengaktifan kembali budaya ronda di lingkungan permukiman. Usulan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan terjadi tindak kriminalitas, khususnya pada malam hingga dini hari.

Masukan tersebut disampaikan Ahmadi saat melaksanakan reses II di Kecamatan Jatiasih. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti persoalan keamanan yang menjadi perhatian warga di daerah pemilihannya, terutama terkait titik-titik jalan yang sering diberitakan sebagai lokasi terjadinya aksi kejahatan jalanan.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, beberapa ruas jalan di wilayah Jatiasih dan Jatisampurna dinilai memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Kondisi jalan yang relatif sepi ketika malam hari hingga menjelang pagi disebut menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk beraksi.

Baca Juga: Ketua DPRD Bekasi Tanggapi Rencana Pemkot Relokasi PPPK ke Tenaga Guru

Sejumlah lokasi yang menjadi sorotan antara lain Jalan Wibawa Mukti dan Jalan Komsen di wilayah Jatiasih. Sementara di Kecamatan Jatisampurna, titik yang dinilai rawan meliputi Jalan Raya Kranggan dan Jalan Alternatif Cibubur. Selain kedua kecamatan tersebut, Ahmadi juga meminta perhatian terhadap wilayah Pondokmelati yang dinilai perlu mendapatkan pengawasan lebih intensif.

Menurut pria yang akrab disapa Madong itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk meningkatkan rasa aman masyarakat. Salah satunya dengan membangun pos pengamanan di kawasan yang dianggap rawan serta mengoptimalkan patroli tiga pilar pada malam hari.

“Saya meminta Wali Kota atau eksekutif agar budaya ronda digalakkan kembali. Saya juga mendorong agar patroli tiga pilar untuk konsen mensasar wilayah rawan kriminalitas, karena bagaimanapun ini masyarakat Kota Bekasi yang berhak mendapat keamanan dari Pemerintah Kota,” ujar Madong.

Baca Juga: Pemkab Bandung Barat Perkuat Perlindungan Sosial Lewat Santunan untuk 1.919 Warga Lansia

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, ia menilai berbagai bentuk kriminalitas jalanan seperti aksi begal, jambret, hingga tawuran memerlukan respons yang cepat dari pemerintah daerah. Menurutnya, upaya pencegahan harus diperkuat agar masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman, terutama saat melintas pada malam hari.

Madong juga mengusulkan agar Wali Kota Bekasi memberikan penugasan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat patroli malam. Langkah tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih intensif dengan aparat keamanan lainnya guna meminimalkan potensi tindak kriminalitas di jalanan.

Ia mengaku sempat melihat informasi di media sosial mengenai dugaan kasus pembegalan di wilayah Jatisampurna yang mengakibatkan adanya korban. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan penting mengapa pengawasan di titik-titik rawan perlu segera ditingkatkan.

“Beberapa waktu lalu, saya liat di medsos ada kejadian begal hingga jatuh korban di wilayah Jatisampurna. Karena itu saya meminta Pemkot Bekasi perkuat patroli malam dititik rawan kriminalitas jalanan,” katanya.

Selain mendorong langkah dari pemerintah daerah, Madong juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat bepergian pada malam hari. Ia menyarankan warga agar menghindari jalur yang sepi apabila memungkinkan atau meminta pendamping ketika harus melintasi kawasan yang dikenal rawan tindak kejahatan.

“Saya himbau kepada masyarakat yang melalui jalur-jalur rawan kriminalitas jalanan untuk

DPRD Bekasi Minta Pemkot Tingkatkan Patroli Malam di Kawasan Rawan Kejahatan

bisa minta ditemani atau hindari jalur-jalur rawan tindak kejahatan. Pemerintah Kota juga harus peduli dan jangan mengabaikan keselamatan nyawa warga Kota Bekasi,” pungkasnya.



Baca Selanjutnya
[Ketua DPRD Bekasi Tanggapi Rencana Pemkot Relokasi PPPK ke Tenaga Guru](#)